



SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
x	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Wajib Pertahankan Opini WTP



KOTA MANNA, BE - Dari hasil laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI), diketahui Bengkulu Selatan (BS) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Atas capaian ini, Sekda BS, Sukarni Dunip SP MM mengaku capaian ini suatu bukti nyata jika Pemda

depannya kita meraih WDP lagi," katanya.

Dikatakan Sukarni, keberhasilan tersebut berkat kerja keras semua organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemda BS dalam bekerja. Dirinya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang sudah bekerja, diantaranya, Inspektorat

BS dibawah kepemimpinan Bupati BS, Gusnan Mulyadi SE MM dan Wakil Bupati BS, H Rifai Tajuddin SSos, serius menindaklanjuti temuan BPK. Oleh karena itu keberhasilan ini harus bisa dipertahankan.

"Tahun depan kita harus kembali bekerja keras. Jangan sampai setelah meraih opini WTP tahun ini, tahun

BPKAD dan semuanya. Sebab, atas kerja keras semua pihak, ini menjadi prestasi yang kita harapkan dari tujuh tahun yang lalu, untuk tahun depan harus dapat mempertahankan opini ini.

"Kita harus bekerja lebih keras lagi, agar capaian ini terus dapat kita pertahankan bahkan kalau bisa lebih baik lagi," ujarnya.

Oleh karena itu, sambung Sukarni, dengan telah diterimanya LHP ini dapat dijadikan sebagai acuan dan pedoman demi meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah. Dengan tetap patuh terhadap aturan, agar pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih baik. Untuk itu, dirinya memastikan Pemda BS terus berkomitmen berbenah dalam aspek tata kelola pengelolaan keuangan dengan terus meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal.

"Kita terus meminta arahan dan bimbingan dari BPK RI, agar penyelenggaraan dan tata kelola keuangan BS di masa yang datang dapat terlaksana dengan baik," imbuhnya.

Selanjutnya, sambung Sukarni, dari hasil LHP dari BPK ini ada beberapa hal yang harus segera diperbaiki dan perlu tingkatkan. Hal tersebut diantaranya terkait dengan kepatuhan terhadap berbagai regulasi dalam pengelolaan keuangan daerah baik itu pendapatan maupun belanja dan hal hal lainnya. Saran dan masukan BPK RI menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Pemda BS terutama dalam tim seperti sekretariat Pemda BS, Inspektorat dan BPKAD.

"Setelah ini, kita akan mulai merencanakan aksi baru untuk melakukan berbagai hal dalam upaya pembenahan pengelolaan keuangan daerah ke depan," terang Sukarni. (369)